

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2016-2021**

**Vidia Utami Putri<sup>1</sup>, Buntoro Heri Prasetya<sup>2</sup>, Mutiara Puspa Widyowati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pakuan, Bogor

Email korespondensi: [vidiautami12@gmail.com](mailto:vidiautami12@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Belanja Modal; Dana Perimbangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah**

**ABSTRACT**

*Financial performance is one of the measuring tools used to assess the ability of regions in implementing regional financial management programs. The purpose of this study was to examine the effect of Regional Original Income, Balancing Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Governments in the Province of Daerah Istimewa Yogyakarta in 2016-2021. The data analysis method used is descriptive statistics, using secondary data. The results showed that the regional original income and balancing funds had a positive and significant effect on the financial performance of local governments, while capital expenditures had no effect on the financial performance of local governments. Simultaneous test results show that local revenue, balancing funds, and capital expenditures have a positive and significant effect on the financial performance of regional governments.*

**Keywords: Balance Fund; Capital Expenditure; Financial Performance; Regional Government; Regional Original Revenue**

## **PENDAHULUAN**

Pendahuluan Pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur keuangannya. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah berupaya dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangannya dinilai baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan menilai sejauh mana keandalan dalam Laporan Keuangan Daerah yang mencakup penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian daerah (Mahmudi, 2016).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah dimana semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan desentralisasi yang akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio ketergantungan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah dimana semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menandakan kurangnya baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Rasio kemandirian daerah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dimana semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensi pendapatan asli daerah sehingga meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Lathifa & Haryono, 2019). Seperti yang dilansir oleh Saputra (2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengkritisi ketergantungan perekonomian daerah pada pemerintah pusat yang masih tinggi walaupun otonomi daerah sudah berjalan selama 20 tahun. Ia menjelaskan persentase ketergantungan ekonomi daerah terhadap pusat mencapai 80,1 persen, sedangkan pendapatan asli daerah hanya sebesar 12,87 persen, maka Airlangga mengarahkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah masing-masing (Bisnis.com). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menilik anggaran belanja daerah yang masih minim. Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu, Astrea Primanto Bhakti menyayangkan komposisi belanja daerah yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai baik melalui gaji maupun honor perjalanan dinas. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk belanja modal hanya sebesar 5-6 persen seperti yang dilansir oleh Ridwansah, 2021 (JawaPos.com).

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Kinerja keuangan merupakan pengukuran pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan suatu instansi. Menurut Pratiwi (2018), yang dimaksud kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil pengukuran dalam melihat kondisi pencapaian pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016) analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari laporan

keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan. Rasio yang digunakan pada penelitian menggunakan tiga rasio, yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Berikut ini ketiga pengukuran dan perhitungannya.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\% \quad (3)$$

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli milik daerah yang digali atas potensi yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya untuk melaksanakan program-program serta aktivitas pembangunan daerah. Kemandirian daerah dalam keuangan daerah sangat diharapkan guna menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Maka, pendapatan asli daerah sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah naik, maka secara tidak langsung kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat yang mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah (Antari dan Sendana, 2018).

### **H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang diterima oleh daerah dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya. Dana perimbangan yang diterima akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020) yang membuktikan dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi.

### **H2: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal**

Belanja modal merupakan salah satu belanja daerah yang dimanfaatkan guna membiayai pembangunan asset tetap dan memberikan manfaat dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pembangunan berupa infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Besaran nilai belanja modal mencerminkan banyaknya pembangunan yang terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi bahkan dari investor sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Malau (2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa dan Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah mengindikasikan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal**

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerah maka semakin besar dana yang diterima untuk pembangunan daerah dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendapatan daerah memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur keuangan daerah sehingga dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengeluaran daerah atau belanja dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Besaran belanja modal dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin tinggi jumlah belanja modal memperlihatkan pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah yang tinggi. Sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai baik sebab adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat.

### **H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK). Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji regresi linier berganda. Uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Deskriptif Kuantitatif**

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut ini gambaran analisis statistik deskriptif kuantitatif.

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

Var	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
PAD	30	12,06	39,62	23,73	9,67
DP	30	48,20	79,16	59,93	8,28
BM	30	12,14	25,50	17,41	3,50
KK	30	93,94	167,59	125,92	24,37
Valid N	30				

Sumber: Hasil olah data (2022)

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji besaran pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui bantuan program IBM SPSS *statistic version 25* diperoleh hasil analisis regresi linier berganda pada tabel berikut.

**Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda**

Var	B	T	sig.	Keterangan
K	10,266	0,905	0,374	
PAD	3,028	28,418	0,000	H1 diterima
DP	0,675	5,599	0,000	H2 diterima
BM	0,193	1,375	0,181	H3 ditolak

Sumber: Hasil olah data (2022)

Hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{Kinerja Keuangan} = 10,266 + 3,028 + 0,675 + 0,198 + e \quad (4)$$

Dari persamaan tersebut dapat dideskripsikan bahwa Konstanta sebesar 10,266 yang artinya bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika tidak ada variabel independen yang dianggap konstan ( $X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$ ) maka kinerja keuangan hasilnya konstan sebesar 10,266. Koefisien pendapatan asli daerah (PAD) meningkat sebesar 3,028 yang artinya apabila terjadi penambahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 3,028 atau 302,8%. Koefisien dana perimbangan meningkat sebesar 0,675 yang artinya apabila terjadi penambahan dana perimbangan sebesar 1% akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,675 atau 67,5%. Koefisien belanja modal meningkat sebesar 0,193 yang artinya apabila terjadi penambahan belanja modal sebesar 1% akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,193 atau 19,3%.

### Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besaran pengaruh variabel independen dan variabel dependen apabila hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besaran nilai R<sup>2</sup> antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Dengan asumsi semakin besar atau semakin mendekati 1 (satu) artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan sebaliknya apabila semakin kecil nilai koefisien determinasi

artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Hasil analisis koefisien determinasi (*Adjusted R2*) tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3. Analisis Koefisien Determinasi**

<i>Model</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,994	0,993

Sumber: Hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel hasil analisis koefisien determinasi diperoleh hasil *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,993 atau 99,3%. Hal ini artinya variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal memiliki pengaruh 99,3% terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya 0,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel penelitian.

#### Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian signifikansi pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan uji t (*t-test*) dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada sig 5%. Hasil pengujian uji t disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

<i>Model</i>	<i>t hitung</i>	<i>t tabel</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
PAD	28,418	1,706	0,000	H1 diterima
DP	5,599	1,706	0,000	H2 diterima
BM	1,375	1,706	0,181	H3 ditolak

Sumber: Hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) dapat dideskripsikan bahwa nilai t hitung pendapatan asli daerah sebesar  $28,418 > 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya H1 diterima atau variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu nilai t hitung dana perimbangan sebesar  $5,599 > 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya H2 diterima atau variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai t hitung belanja modal sebesar  $1,375 < 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,181 > 0,05$ . Artinya H3 ditolak atau variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

<i>Model</i>	<i>F hitung</i>	<i>F table</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
1	1424,640	2,98	0,000	H4 diterima

Sumber: Hasil olah data (2022)

Berdasarkan tabel hasil uji simultan, variabel independen memiliki nilai F hitung  $1424,640 > 2,98$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen

(pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil pengumpulan data (teori, penelitian terdahulu dan analisis variabel independen dengan variabel dependen) pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 dilakukan pembahasan yang diuraikan sebagai berikut.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $28,418 > 1,706$  dengan taraf signifikan di bawah  $0,05$  yaitu  $0,000$  yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020. Koefisien bernilai positif, maka setiap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Setiap kenaikan satu-satuan pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar  $3,028$  atau  $302,8\%$ .

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli yang mana pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri. Apabila sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diterima semakin tinggi, maka akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang semakin baik.

Prastiwi & Aji (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya agar pemerintah daerah tidak bergantung terhadap dana bantuan berupa dana transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan atau program pemerintahan menunjukkan kemandirian pemerintah daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Sejalan dengan kondisi dan fakta variabel yang diteliti, dimana setiap kenaikan rasio pendapatan asli daerah akan diikuti dengan kenaikan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020), Leki dkk (2018), dan Maulina dkk (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah akan mempengaruhi tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak konsisten dengan penelitian Putri & Damayanti (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian bahwa perolehan kekayaan daerah berupa pendapatan asli daerah belum optimal sehingga tidak serta merta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah terkait.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung yang lebih besar daripada  $t$  tabel yaitu  $5,599 > 1,706$  dengan nilai signifikansi dibawah  $0,05$  yaitu  $0,000$  yang artinya variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Koefisien bernilai positif, yang berarti apabila variabel dana perimbangan mengalami kenaikan maka variabel kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan. Setiap kenaikan satu-satuan pada dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar  $0,675$  atau  $67,5\%$ .

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang lebih besar dengan kegiatan atau program-program pemerintahan yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri (Wahyudin & Hasturi, 2020). Maka dengan adanya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hal ini dapat menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tingkat ketergantungan akan menyebabkan kemandirian pemerintah yang rendah. Hasil penguatan data dengan melihat nilai realisasi belanja menurut fungsinya yang dapat dilihat pada lampiran. Rata-rata pengalokasian belanja menurut fungsinya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalokasikan untuk sektor pendidikan, sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas pendidikan, pelayanan, dan fasilitas publik yang memadai untuk masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima oleh daerah sudah dialokasikan sesuai target sehingga penggunaan dana perimbangan dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin & Hasturi (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauw & Riharjo (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung yang lebih kecil dari  $t$  tabel yaitu  $1,375 < 1,706$  dengan nilai signifikansi  $0,181 > 0,05$  yang berarti  $H_3$  ditolak, variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menandakan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal untuk perolehan asset tetap dan lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Realisasi belanja modal yang dilakukan belum dapat meningkatkan aktiva tetap pemerintah daerah dan menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang (Antari & Sendana, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut maka menandakan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan belum mampu menghasilkan sumber-



sumber keuangan secara langsung bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah yang menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan kondisi dan fakta variabel, yang mana saat belanja modal mengalami kenaikan atau penurunan, tidak memengaruhi posisi rasio kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan konsisten dengan penelitian Silvi (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lathifa & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menggunakan uji simultan (uji F) memperoleh nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel yaitu  $1424,640 > 2,98$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,993 atau 99,3% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebesar 99,3% dan sisanya 0,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

Secara simultan atau secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Agustina (2018) menjelaskan bahwa variabel atau faktor-faktor harus dijalankan bersama agar menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil positif dan signifikan pada uji simultan mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam menyelaraskan pemanfaatan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sehingga secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara individual dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa ada sinergi yang baik, bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil dalam menggabungkan faktor-faktor tersebut sehingga memperoleh kinerja keuangan yang baik.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2019) yang menyatakan bahwa simultan atau secara bersama-sama variabel Belanja modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara individu atau secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Secara bersama-sama atau simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hal ini menunjukkan bahwa variabel atau faktor-faktor yang dijalankan bersama tidak terdapat masalah dalam menyelaraskan pemanfaatannya sehingga menciptakan kinerja keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021. Hasil penelitian tidak dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas karena penelitian ini hanya menguji Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhabsyi, R. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (Periode Tahun 2012-2015). Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Antari, N. dan Sendana, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen Unud.
- Ayu, P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. Jurnal Akuntansi & Ekonomi.
- Febriansyah, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Journal of Economics and Business.
- Hastuti, S. (2018). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pada BPKPAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Heryanti, C., Wahidahwati., dan Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Lathifa, H. dan Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Leki, Y., Naukoko, A., dan Sumual, J. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Gowa: Pusaka Almailda.
- Malau, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi
- Martantri, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di

- Jawa Tengah Tahun 2013-2017). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Maulina, A., Alkamal, M., dan Fahira, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*.
- Nauw, E. dan Riharjo, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Nugraheni, E. dan Adi, P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- \_\_\_\_\_. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastiwi, N. dan Aji, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*.
- Pratiwi, T. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyono, N., Fatimah, A., dan Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*.
- Putri, N. dan Darmayanti, N. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen*.
- Ridwansah, D. (2021). Anggaran Daerah Lebih Besar Buat Pegawai Dibanding Belanja Modal. *Jawapos.com*. Tersedia di: <https://www.jawapos.com/ekonomi/08/06/2021/anggaran-daerah-lebih-besar-buat-pegawai-dibanding-belanja-modal/>
- Saputra, D. (2021). 20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi. *Bisnis.com*. Tersedia di: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>
- Saraswati, D. dan Rioni, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*.
- Silvi, D. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suseno, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
- Wahyudin, I. dan Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal.
- Yanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.